

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022



Jl. Jati No. 123 Telp. (0342) 801371 Blitar 66121

E-mail : kec-sukorejo@blitarkota.go.id

Instagram : [kec_sukorejo123](#)

Facebook : [Kecsukorejo](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar” dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 tentu akan berbeda nuansa dengan tahun 2021 dan sebelumnya karena pada tahun 2022 kita berada pada masa “New Normal”, mengingat di Tahun 2021 dan 2020 kita semua berada pada suasana pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap kinerja di pemerintahan. Pada tahun 2022 banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah, maka salah satunya dengan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap agar laporan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Kecamatan Sukorejo dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Blitar, 14 - 2 - 2023

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

ITO BASKORO, S.Sos
Pembina
NIP. 19690601 199003 1 010

EXCECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 tentu akan berbeda nuansa dengan tahun 2021 dan sebelumnya karena pada tahun 2022 kita berada pada masa “New Normal”, mengingat di Tahun 2021 dan 2020 kita semua berada pada suasana pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap kinerja di pemerintahan. Pada tahun 2022 banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah, maka salah satunya dengan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”**. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup”.

Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 28.093.259.205** (sebelum perubahan) dan **Rp. 28.571.525.333** (setelah perubahan) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar **98,93 %** atau sebesar **Rp. 28.266.343.679,03**. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di

Kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” dengan target bernilai baik (89). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II. Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2022 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai rata-rata IKM 89,11.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan nilai 89,11. Sedangkan Pengukuran kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo melebihi nilai 100%, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Sasaran I :

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan tercapai 103,09 %.

2. Sasaran II :

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah tercapai 133,33 %.

3. Sasaran III :

Meningkatnya kinerja perangkat daerah tercapai 100,28%

Selain itu, analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sukorejo memiliki hasil :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,08. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 95,84 %.
2. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,34. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,76 %.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,02. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,57 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum	8
E. Aspek-Aspek Strategis	10
F. Isu-Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	21
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2022	23
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022.....	28
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	29
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022.....	31
(Kecamatan Sukorejo dengan Kecamatan Sananwetan)	
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome).....	34
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	34
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
C. Prestasi/Penghargaan.....	40

BAB I	PENUTUP	42
A.	Kesimpulan.....	42
B.	Saran	43
LAMPIRAN.....		45
A.	Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026	46
B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	47
C.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	97
D.	Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran.....	15
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Non Administrasi Umum	16
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Umum Tahun 2022	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022.....	18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022	21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan.....	23
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran I	24
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran II.....	27
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran III	30
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022.....	31
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026.....	31
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sanan Wetan).....	33
Tabel 3.9 Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2022	34
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022	36
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2022	38
Tabel 3.12 Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan.....	39
Tabel 3.13 Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo Tahun 2022.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan	2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kelurahan	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam amanatnya menyebutkan Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 tentu akan berbeda nuansa dengan tahun 2021 dan sebelumnya karena pada tahun 2022 kita berada pada masa “New Normal”, mengingat di Tahun 2021 dan 2020 kita semua berada pada suasana pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap kinerja di pemerintahan. Pada tahun 2022 banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah, maka salah satunya dengan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibility*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait

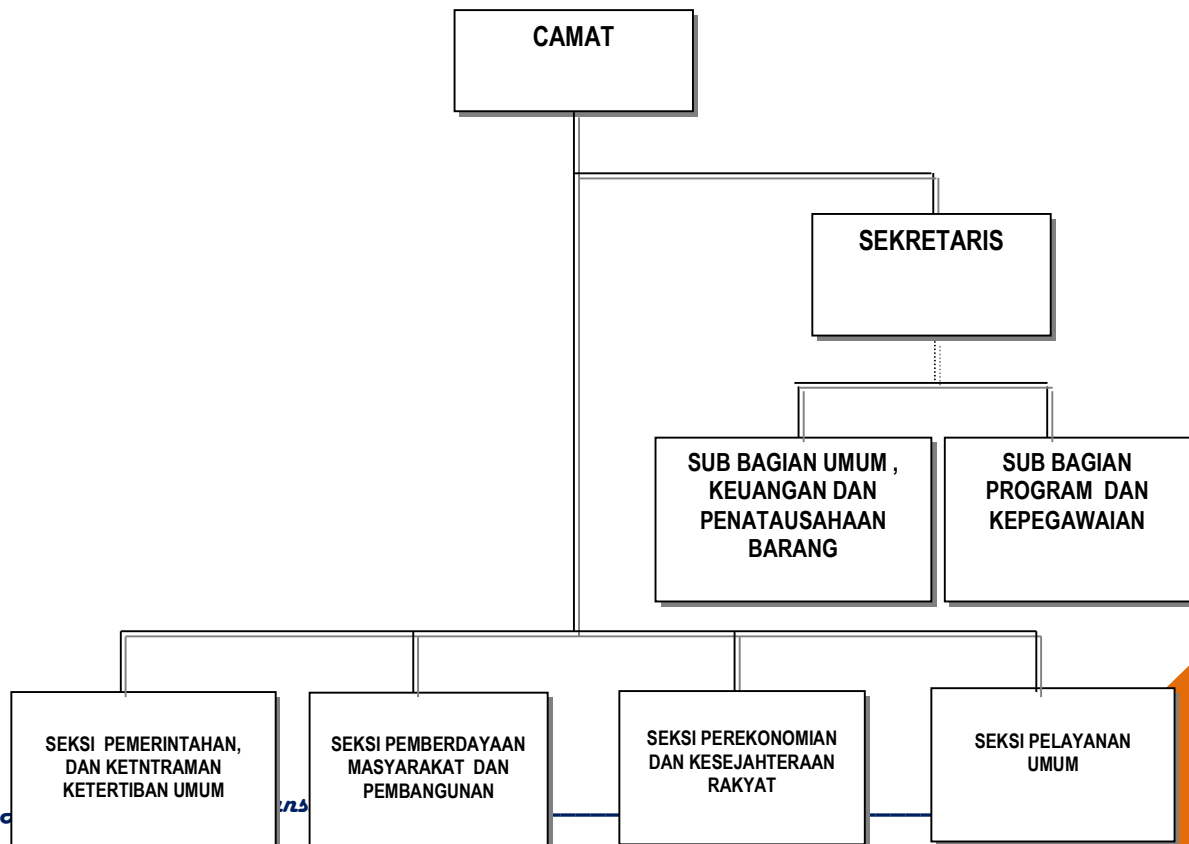
dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Blitar terutama misi ke 5 yaitu, **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**, yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar maupun langkah penanganan covid-19 yang telah diambil oleh Kecamatan Sukorejo.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang didalamnya terdapat kelurahan (kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan bukan merupakan organisasi perangkat daerah) maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sesuai struktur organisasi berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan sebagaimana tersebut di atas kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

I. KECAMATAN

I.1 KEDUDUKAN KECAMATAN :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota Blitar yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

I.2 FUNGSI KECAMATAN

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tumpang tantra di wilayah kerjanya;
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.3 KEWENANGAN KECAMATAN

Kecamatan mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di kecamatan dan kelurahan;
- b. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

- j. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

II. KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dapat kami uraikan sebagai berikut :

II.1 KEDUDUKAN KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

II.2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

b) Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

c) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

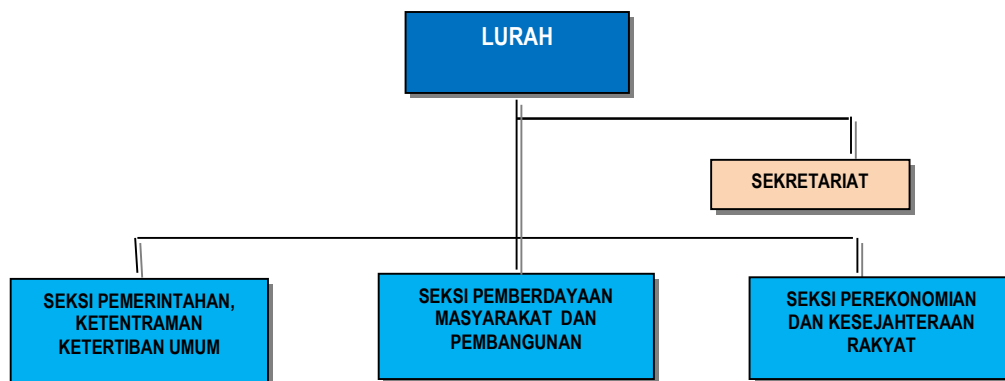
e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi;
2. Sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar kepada pemerintah kota maupun masyarakat.
3. Memberikan informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Blitar akhir tahun anggaran 2022.

Adapun tujuan disusunnya pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKJI) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada kepala daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

A. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam uraian dibawah ini :

Faktor Kekuatan :

1. Terdapat SOP pada tiap tahapan pelayanan masyarakat dan perkantoran.

2. Sarana dan prasarana kantor penunjang tugas pokok dan fungsi terpenuhi dengan baik.
3. Cepatnya tingkat responsibility SDM terhadap kondisi lingkungan.
4. Harmonisnya tingkat hubungan kinerja antara kecamatan dan kelurahan.
5. Kelancaran tugas terbantu dengan penerapan teknologi informasi.

Faktor Kelemahan :

1. Dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang kurang memadai.
2. Tata kelola perkantoran belum mencerminkan tata kelola perkantoran modern.
3. Berbedanya persepsi dan tingkat pemahaman terhadap peraturan.

Faktor Peluang :

1. Diperluasnya ruang berkarya bagi kecamatan dengan kebijakan Kepada Daerah.
2. Baiknya tingkat partisipatif masyarakat dalam mendukung proses pembangunan di wilayah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Adanya sinergi yang baik antara Forpimcam, KUA, Puskesmas, seluruh OPD terkait dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Faktor Tantangan

1. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas (Diklat, TOT, *in house training*) bagi perangkat kecamatan.
2. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima yang cepat, efektif, dan efisien.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Masih rendahnya peningkatan kapasitas personil dalam melaksanakan tugas dan peningkatan pelayanan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi tupoksi dan kewenangan antara kecamatan dengan Perangkat Daerah.
3. Naiknya tingkat pengangguran masyarakat dikarenakan pada masa "New Normal" pasca Covid-19 banyak masyarakat wilayah Kecamatan Sukorejo terkena dampak PHK.
4. Gejolak inflasi perekonomian di wilayah Kecamatan Sukorejo menyebabkan daya beli masyarakat menurun memerlukan penanganan dengan cepat agar percepatan pemulihan ekonomi pada masa "New Normal" pasca Covid-19 segera terwujud.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kinerja dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan strategis memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta isu-isu strategis, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”**, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-5, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat tujuan dan sasaran yang menjadi patokan dalam suatu kegiatan, yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	97%
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)

Sumber: Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam mendukung misi ke-5 yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”** telah ditetapkan kinerja utama Kecamatan Sukorejo yang didokumenkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”**. Kinerja utama ini ditetapkan dengan memperhatikan bahwa tugas pokok fungsi kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota Blitar yaitu sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai unsur pelaksana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Misi V: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Sedangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Non Administrasi Umum yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Non Administrasi Umum Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

Selain program dan kegiatan di atas, program dan kegiatan dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Umum Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota atau Bupati sebagai

pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan antara kepala daerah sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja fokus mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	100%

	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	75%
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2.184.578.390,00	PAD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.365.305.065,00	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 819.273.325,00	PAD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 3.147.167.185,00	DAU dan/atau DID
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 12.852.766.085,00	DAU,DID
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rp. 294.401.100,00	DAU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 527.059.710,00	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 527.059.710,00	PAD
	TOTAL	Rp. 15.858.805.285,00	P-APBD

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian IKU dan sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	100%	103,09 %
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%	97%	100%

	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%	100%	133,33 %
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase RT berdaya	75%	97%	129,33%
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (85,00)	100,28%

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tribulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo adalah merupakan indikator tujuan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan indikatornya

tercapainya nilai Baik (89) pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” bernilai baik. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sukorejo rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pada semester 1 dan semester 2.

Dalam melaksanakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Sukorejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang menitik beratkan pada 9 (sembilan) unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	A (89)	A (89,11)	100,12%

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2022 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai rata-rata IKM Semester 1

dengan Semester 2, yaitu 89,11. Nilai IKM tersebut diambil dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Semester 1 dan semester 2 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Semua unsur menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kecamatan Sukorejo menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata **Indeks 3,81**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan Sukorejo sangat memuaskan

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

- **SASARAN I:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan .

Indikator keberhasilan sasaran I, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%	100%	103,09 %

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah sesuai dengan standar pelayanan dengan capaian sebesar 103,09 %. Untuk mengukur pencapaian atas sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya yakni dengan melaksanakan penghitungan persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan selama tahun 2022. Sehingga capaian kinerja pada sasaran I **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah 103,09 %.

Untuk mendukung sasaran I tersebut terdapat satu Program, yaitu Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator Kinerja dari Program tersebut yaitu Persentase layanan Kecamatan tepat waktu. Pada tahun

2022 telah ditetapkan target kinerja sebesar 97% dan pada akhir tahun 2022 didapat hasil realisasi capaian kinerja sebesar 97%. Disini dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang didapat sebesar 100%. Dengan demikian, maka target dan realisasi dari indikator kinerja program tersebut telah terlaksana sesuai perencanaan di awal tahun. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung :

Selama Tahun 2022 masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 2.742 orang. Dari data tersebut semua masyarakat pemohon layanan merasa puas, yaitu sebanyak 2.742 orang. Dalam Persentase, kualitas pelayanan administrasi kecamatan Sukorejo bernilai 100% yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan sangat baik. Apabila kita bandingkan dengan data di Tahun 2021, maka di Tahun 2022 jumlah masyarakat yang melakukan permohonan layanan naik dibanding Tahun 2021. Dari data seksi pelayanan menunjukkan bahwa di Tahun 2021 terdapat 2.631 orang yang melakukan permohonan layanan di Kecamatan Sukorejo. Salah satu penyebab adanya kenaikan angka masyarakat yang meminta pelayanan di Kecamatan Sukorejo karena di masa “New Normal” masyarakat optimis bahwa pasca pandemi covid-19 keadaan perekonomian akan segera pulih dan membaik. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat karena meskipun kita di masa “New Normal” layanan tetap diberikan dengan protokol kesehatan yang baik sehingga pengguna layanan dan pemberi layanan memiliki rasa aman dan nyaman. Melalui SOP kedatangan tamu/pengguna layanan tersebut, maka kepastian keamanan dari resiko penularan dan penyebaran covid-19 terhadap pengguna layanan membuat masyarakat merasa aman dan puas. Selain itu adanya SOP disetiap layanan, mulai kepastian persyaratan, kepastian waktu selesainya, kepastian produk layanan dapat diukur dan diketahui oleh penerima layanan juga menjadi indikator kepuasan masyarakat. Prosentase penurunan angka masyarakat yang tidak puas dengan layanan Kecamatan Sukorejo dapat diperhatikan dari 9 indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan pengukuran kualitas layanan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Berdasarkan survey yang dilakukan maka masyarakat merasa jelas dengan persyaratan setiap proses layanan yang diberikan serta tidak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan telah terinformasikan ke media-media (leaflet, anjungan layanan kecamatan serta media sosial yang mudah diakses baik website, instagram, facebook, whatsapp) yang ada sehingga memudahkan seluruh warga masyarakat diwilayah Kecamatan Sukorejo dalam mencari layanan.

3. Waktu Penyelesaian

SOP masing-masing jenis layanan telah tersusun sehingga memberikan kepastian waktu penyelesaian dari setiap jenis pelayanan sehingga kepastian waktu pelayanan dapat dijamin.

4. Biaya/Tarif *)

Seluruh layanan yang diberikan di Kecamatan Sukorejo tidak dikenakan biaya atau tarif, sehingga layanan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa melihat golongan ekonomi.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Sehubungan dengan SOP setiap jenis layanan telah tersusun maka keluaran setiap jenis layanan dapat diketahui dan sesuai dengan yang ditetapkan.

6. Kompetensi Pelaksana

Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini jumlah komposisi pegawai di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mengalami kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, termasuk dalam hal ini Kecamatan Sukorejo. Namun untuk meminimalisir kekurangan tersebut terutama tenaga pelayanan, maka langkah di Kecamatan Sukorejo yaitu melalui penetapan SOP, pelatihan untuk petugas pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana

Untuk meningkatkan etika serta estetika petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Sukorejo, maka dilaksanakan secara rutin pelatihan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk mewujudkan pelayanan yang responsif, maka ruang pelayanan di Kecamatan Sukorejo telah memfasilitasi adanya link aduan yang dapat diakses melalui whatsapp, instagram, facebook, website, email dan telepon serta adanya anjungan layanan yang didalamnya menampung seluruh saran serta kritikan dari pemohon layanan.

9. Sarana dan prasarana

Sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tentunya seluruh sarana prasarana pendukung layanan harus memenuhi syarat. Secara berkelanjutan dilaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pendukung layanan kepada masyarakat baik sarana prasarana utama maupun penunjang, termasuk pemeliharaan pada software penunjang layanan. Merujuk terhadap kesembilan unsur tersebut, dapat diidentifikasi kondisi pelayanan publik di Kecamatan Sukorejo, permasalahan, dan solusi agar ke depan pelaksanaan pelayanan bisa berjalan lebih baik.

Faktor Penghambat : Pejabat penandatanganan dokumen pelayanan tidak berada di tempat, sehingga menghambat tercapainya layanan kecamatan tepat waktu.

Upaya Tindaklanjut : Dengan adanya hambatan tersebut, maka Kecamatan Sukorejo memanfaatkan Tandatangan Elektronik sebaik mungkin, serta meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan pejabat penandatanganan dalam mempergunakan Teknologi Digital demi meningkatkan serta memperbaiki layanan di Kecamatan Sukorejo.

• **SASARAN II :** Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah

Indikator keberhasilan sasaran II, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase kelurahan berdaya	75 %	100 %	133,33 %

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Indikator Sasaran kedua, yaitu Persentase kelurahan berdaya yang didapatkan dari hasil penghitungan jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya dibagi Jumlah Kelurahan dan kemudian dikalikan 100%.

Realisasi capaian indikator sasaran kedua untuk tahun 2022 ini adalah 100%. Dimana seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran kedua “ **Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah**” adalah 133,33 %.

Pada sasaran II tersebut mencakup dua Program, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan Persentase RT berdaya. Indikator pertama dapat dihitung dengan membandingkan antara koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ada. Pada tahun 2022, target kinerja dari indikator program ini adalah 100% , dan pada akhir tahun didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana kemudian didapat pula capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja kedua dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah RT yang berdaya dengan jumlah seluruh RT yang berada di Kecamatan Sukorejo. Pada Tahun 2022 target kinerja dari indikator ini adalah 75%. Sedangkan realisasinya sebesar 96 % karena di Kecamatan Sukorejo terdapat 1 (satu) RT yang tidak difasilitasi RT Keren karena pada tahun 2021 telah dijadikan sebagai percontohan. Berdasarkan target dan realisasi kinerja, maka didapat capaian kinerja sebesar 129,33 %.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjuti dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung

Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul baik pada masyarakat maupun tenaga pendamping RT Keren, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat

dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2022, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) secara terus menerus dijalin dengan baik untuk mendukung Program Walikota seperti RT Keren agar tercapainya Kelurahan berdaya.

Faktor Penghambat : Masih seringnya muncul ego sektoral dari beberapa Lembaga kemasyarakatan dimana hal tersebut mengakibatkan upaya pemberdayaan yang dilakukan sedikit terhambat.

Upaya Tindaklanjuti : Mengoptimalkan koordinasi antara Lembaga kemasyarakatan dan seluruh sektor yang terkait di lingkup Kecamatan Sukorejo.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard. Hal tersebut dapat diukur dengan membandingkan koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standard dengan jumlah seluruh koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Pada tahun 2022 telah ditetapkan target sebesar 100%. Kemudian berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan di akhir tahun 2022 didapat realisasi kinerja sebesar 100% yang mana menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor Pendukung : Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan,

FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupunantisipasi kejadian yang akan ditimbulkan. Selain itu, juga koordinasi dan hubungan yang terselenggara dengan baik antara lima pilar yang ada di Kecamatan Sukorejo.

Faktor Penghambat : Penanganan permasalahan yang terkadang masih terganjal pada kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh OPD tertentu.

Upaya Tindaklanjut : Menjaga keharmonisan Hubungan koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kecamatan. Selain itu, juga membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal yang dapat menjamin ketepatan dan kecepatan aliran informasi.

- **SASARAN III** : Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Indikator keberhasilan sasaran III, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran III

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (85,00)	100,28 %

Sumber : Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Indikator sasaran ketiga, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang didapatkan dari Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda. Dimana Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Sukorejo berdasarkan hasil review Irda untuk tahun 2022 ini adalah 85,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo telah mengalami peningkatan, sehingga capaian kinerja sasaran kedua “ **Meningkatnya kinerja perangkat daerah**” adalah 100,28 %.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka berikut kami uraikan Faktor Pendukung, Penghambat, dan Tindaklanjut dari capaian Kinerja yang didapat.

Faktor Pendukung : Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Sukorejo telah memadai

Faktor Penghambat : Etika petugas pelayanan yang kurang baik

Upaya Tindaklanjuti : Perlu diadakan peningkatan kompetensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan di Kecamatan Sukorejo.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2022

Pada tahun 2022 kita melaksanakan visi misi Walikota yang berada dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra 2021-2026 sehingga terdapat beberapa perubahan pada tujuan, sasaran serta indikator Kecamatan Sukorejo pada Renstra 2021-2026. Apabila diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI	
					2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,11)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	NA	97%	NA	100%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	25 %	75 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A (84,76)	A (84,76)	A (85,00)

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2021 dan 2022

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA	Realisasi sd 2022	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (89,11)	100,12 %

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	98 %	100%	102,04 %
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75 %	100 %	133,33 %
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (85,00)	100,28 %

Sumber: RENSTRA Kecamatan Sukorejo Tahun 2021 – 2026 dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Kecamatan Sukorejo untuk memperbaiki proses pelayanan yang ada di masa “New Normal” Pasca Covid-19. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil survey IKM menyebutkan bahwa diperlukan Untuk meningkatkan nilai pelayanan maka diperlukan pelayanan berbasis IT sampai tingkat kelurahan guna meminimalisir persyaratan dan prosedur pengajuan layanan selain itu perlu adanya kegiatan rutin yang sifatnya motivasi kepada petugas layanan kecamatan guna peningkatan kompetensi setiap petugas. Secara umum pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sukorejo berbasis IT, namun belum maksimal. Artinya pemohon masih menuju ke petugas layanan guna mendapatkan layanan, seharusnya dengan digunakannya IT maka pemohon tidak perlu mendatangi pemberi layanan, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan bila pemohon harus mendatangi petugas layanan di kecamatan. Oleh karena itu embrio aplikasi pelayanan berbasis system, yaitu SIMAYA PERGI perlu dimaksimalkan dan diterapkan di 7 (tujuh) kelurahan dan kecamatan dalam memberikan pelayanan. Selain Aplikasi Simaya Pergi, terdapat pula aplikasi SILPUSITRON yang memudahkan input data masyarakat pemohonan persuratan. Dari aplikasi SILPUSITRON menghasilkan output surat yang lebih efektif, dan efisien.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan wilayah yang dinilai dari persentase kelurahan berdaya, maka selama tahun 2022 capaiannya 100%, yang artinya seluruh kelurahan di Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan Berdaya dan kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan Kelurahan berdaya dengan sangat baik, sehingga capaian kinerja sasaran kedua adalah 100%.

Untuk sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah yang dinilai dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 nilai SAKIP Kecamatan

Sukorejo adalah A (85,00) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022
(Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sanan Wetan)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SUKOREJO				KECAMATAN SANAN WETAN			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,11)	Baik (83)	Baik (84)	Baik (82,89)	Baik (83,14)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	NA	97%	NA	100%	NA	97%	NA	100%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	25 %	75 %	100 %	100 %	25 %	75 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (Baik)	A (84,76)	A (84,76)	A (85,00)	A (83)	A (84,88)	A (84,88)	A (85,06)

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo dan Sananwetan Tahun 2021- 2022

Apabila diperhatikan data di atas, maka realisasi target Kecamatan Sukorejo di atas Kecamatan Sananwetan, yaitu pada indikator tujuan dan sasaran III . Namun bila dianalisa lebih mendalam peningkatan prosentase capaian target dari tahun 2021 ke tahun 2022 hampir sama dengan Kecamatan Sananwetan. Terlepas data tersebut maka dapat dibaca bahwa kedua kecamatan yang ada di Kota Blitar ini serius dalam melaksanakan 9 (Sembilan) indikator pelayanan yang tertuang dalam survey IKM.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan capaian nilai IKM Kecamatan Sukorejo lebih tinggi daripada Kecamatan Sananwetan. Sesuai data di atas, maka kedua kecamatan terklkkvvvvc ait kualitas pelayanan publik di kedua Kecamatan pada tahun 2021 dan 2022 adalah sangat baik. Hal ini menunjukkan keseriusan perangkat di dua kecamatan ini dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun permintaan dari instansi terkait lainnya dilaksanakan dengan sangat baik.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama Kecamatan Sukorejo.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Alokasi Sasaran Pembangunan Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Rp. 2.184.578.390,00	7,65 %
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Rp.13.674.226.895,00	47,86 %
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rp. 12.712.720.048,00	44,49 %

Sumber: Data Penjabaran P-APBD Kota Blitar Tahun 2022 (Kecamatan beserta Kelurahan)

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar memiliki anggaran sebesar **Rp. 28.093.259.205** (sebelum perubahan) dan **Rp. 28.571.525.333** (setelah perubahan) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar **98,93 %** atau sebesar **Rp. 28.266.343.679,03**. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo yang didukung Anggaran tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan”** dengan sasaran I yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ”** sebesar **Rp. 2.184.578.390,00**. Pagu tersebut merupakan anggaran Non Administrasi Umum di bagian pelayanan kepada masyarakat. Pada sasaran II, yaitu **“Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah”** didukung oleh anggaran Non Administrasi Umum selain pelayanan sebesar **Rp.13.674.226.895,00**. Pada sasaran III, yaitu **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** didukung oleh anggaran Administrasi Umum sebesar **Rp. 12.712.720.048,00**. Dengan dukungan anggaran sebagaimana di atas, Kecamatan Sukorejo berhasil mencapai kinerja sesuai dengan targetnya. Berikut penjelasan pencapaian kinerja secara detail terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97 %	100 %	103,09 %	2.184.578.390,00	2.093.743.638,00	95,84 %
	Program I : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97 %	97 %	100 %	2.184.578.390,00	2.093.743.638,00	95,84 %
2	Sasaran II : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	97 %	100 %	103,09 %	13.674.226.895,00	13.641.195.049,00	99,76 %
	Program II : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %	13.147.167.185,00	13.129.667.749,00	99,87 %
		2. Persentase RT berdaya	75%	97%	129,33 %			
	Program III : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	527.059.710,00	511.527.300,00	97,05 %

3	Sasaran III : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	A (85,00)	100,28 %	12.712.720.048,00	12.531.404.992,03	98,57 %
	Program IV : Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (89)	Baik (89,11)	100,12%	12.712.720.048,00	12.531.404.992,03	98,57 %

Sumber: Pengukuran Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kinerja pada :

- Program I tercapai 100 % dengan serapan realisasi anggaran sebesar 95, 84 % atau Rp. 2.093.743.638,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.184.578.390,00;
- Program II tercapai lebih dari 100 % dengan serapan realisasi anggaran sebesar 99, 87 % atau Rp. 13.129.667.749,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.147.167.185,00.
- Program III tercapai 100 % dengan serapan realisasi anggaran sebesar 97,05 % atau Rp. 511.527.300,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 527.059.710,00; dan
- Program IV tercapai 100 % dengan serapan realisasi anggaran sebesar 98,57 % atau Rp. 12.531.404.992,03 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 12.712.720.048,00

Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi per kegiatan dari Kecamatan Sukorejo dapat kita perhatikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.712.720.048,00	12.531.404.992,03	98,57 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	54.040.200,00	53.711.600,00	99,39 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.760.704.854,00	8.637.329.969,00	98,59 %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.798.298,00	268.562.650,00	99,91 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.315.683,00	1.100.238.615,00	99,63%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.279.200,00	9.279.200,00	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.758.324,00	1.002.333.040,03	96,03 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.823.489,00	1.459.949.918,00	99,19 %
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.184.578.390,00	2.093.743.638,00	95,84 %
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.365.305.065,00	1.353.403.025,00	99,13 %
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	819.273.325,00	740.340.613,00	90,37%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.147.167.185,00	13.129.667.749,00	99,87 %
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.852.766.085,00	12.835.887.649,00	99,87%
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	294.401.100,00	293.780.100,00	99,79 %
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	527.059.710,00	511.527.300,00	97,05 %

12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	527.059.710,00	511.527.300,00	97,05 %
JUMLAH		28.571.525.333,00	28.266.343.679,03	98,93 %

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2022

Secara umum realisasi anggaran untuk Kecamatan Sukorejo sebesar 98,93 %. Realisasi tersebut dinilai telah baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terserap dengan baik. Adapun permasalahan pada Kecamatan Sukorejo tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdapat anggaran sisa anggaran santunan kematian.
2. Persentase Realisasi tidak maksimal karena Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dimana dalam kegiatan terdapat honor P3N. pada anggaran honor P3N tersebut tidak terserap maksimal sebab kelebihan dalam hal perencanaan karena bergantinya aturan.
3. Persentase Realisasi tidak maksimal pada kegiatan rutin penunjang yang terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan untuk persiapan kenaikan biaya rutin yang tidak terduga pada tahun 2022 seperti biaya listrik, pajak, koran, dan lain sebagainya.

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Sukorejo selama tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	103,09 %	95,84 %	1,08
Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	133,33 %	99,76 %	1,34

Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,28 %	98,57 %	1,02
---------------------------------------	------------------------------	----------	---------	------

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Keterangan tingkat efisiensi :

≥ 1 : efisien

< 1 : tidak efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan terhadap Analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,08. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 95,84 %.
2. Analisis Sasaran Strategis 2: “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,34. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,76 %.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,02. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,57 %.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada masa “New Normal” dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi karena inflasi pasca covid-19, Kecamatan Sukorejo dan 7 (tujuh) kelurahan yang ada didalamnya kembali menyusun rencana kegiatan dan menata ulang perekonomian di wilayah Kecamatan Sukorejo yang diwujudkan dengan melalui berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima diantaranya yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Prestasi/Penghargaan Kecamatan Sukorejo tahun 2022

No	Penghargaan	Tingkat Penghargaan	Tahun	KET.
1	Pelaksana Gotong Royong Terbaik 3 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	Provinsi Jawa Timur	2022	Tanjungsari
2	Juara 2 Lomba Inovasi Pelayanan Publik	Kecamatan	2022	Tanjungsari

No	Penghargaan	Tingkat Penghargaan	Tahun	KET.
	Tingkat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022	Sukorejo		
3	Pemenang 2 Kategori Kelurahan Pada Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	Provinsi Jawa Timur	2022	Tanjungsari
4	Pelaksana Terbaik 3 - 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Kategori Kota	Provinsi Jawa Timur	2022	Tanjungsari
5	Pokja Kelurahan Sehat Terbaik 3 Tingkat Kecamatan Sukorejo	Dinkes Kota Bliitar	2022	Tanjungsari
6	Pengisian Aplikasi RDK terbaik (diperoleh Kampung KB Sentosa Kelurahan Tanjungsari)	P3A2KB Kota Blitar	2022	Tanjungsari
7	Penghargaan Proklamasi Lestari Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2022	Karangsari
8	Juara 1 lomba Biopori	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	2022	Karangsari
9	Juara 1 Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Kelompok B	BPKAD Kota Blitar	2022	Karangsari
10	Penghargaan East Java Tourism	Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur	2022	Karangsari
11	Juara 2 Lomba Lurah bercerita	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	2022	Karangsari
12	Juara 4 Pokja kel sehat	Dinkes Kota Bliitar	2022	Karangsari
13	Juara 3 Lomba Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	2022	Karangsari
14	Peserta Terbaik Sukorejo Creative Festival	Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	2022	Karangsari
15	Juara 1 Lomba Pelayanan	Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	2022	Karangsari
16	Penghargaan peran serta dalam percepatan penanganan pandemi covid 19 Kota Blitar	Walikota Blitar	2022	TURI
17	Penghargaan sebagai Kelurahan Berprestasi lunas 100% sebelum jatuh tempo dalam pemungutan PBB-P2	Walikota Blitar	2022	TURI
18	Juara 1 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022	Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	2022	TURI

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2022 adalah masa “New Normal” pasca Pandemi Covid 19 mewabah di dunia. Pada tahun 2022 banyak program dan kegiatan di pemerintahan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian setelah masa pandemi covid-19, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo.

Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 28.093.259.205** (sebelum perubahan) dan **Rp. 28.571.525.333** (setelah perubahan) dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar **98,93 %** atau sebesar **Rp. 28.266.343.679,03**. Besarnya nilai serapan dapat kita ambil kesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan” dengan target bernilai baik (89). Pengukuran kualitas pelayanan publik dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II. Secara keseluruhan 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian kualitas pelayanan (persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana) melalui Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2022 memiliki mutu pelayanan A, yang artinya sangat memuaskan para pengguna layanan dengan nilai rata-rata IKM 89,11.

Pada bab – bab sebelumnya telah kami sajikan berbagai hal terkait kinerja Kecamatan Sukorejo, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai sangat baik dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan nilai 89,11. Sedangkan Pengukuran kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo melebihi nilai 100%, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Sasaran I :

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan tercapai 103,09%.

2. Sasaran II :

Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah tercapai 133,33%.

3. Sasaran III :

Meningkatnya kinerja perangkat daerah tercapai 100,28%

Disamping itu dapat diambil kesimpulan terkait analisa Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sukorejo dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran Strategis 1: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan" tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,08. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 95,84 %.
2. Analisis Sasaran Strategis 2: "Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah" tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,34. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 99,76 %.
3. Analisis Sasaran Strategis 3: "Meningkatnya kinerja perangkat daerah" tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,02. Dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,57 %.

Keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Sukorejo tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo, sehingga pada tahun 2022 nilai SAKIP Kecamatan Sukorejo adalah A (85,00) yang artinya kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sukorejo adalah sangat Baik dikarenakan tertib administrasi, tepat waktu dan sesuai dengan standar.

B. SARAN

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja utama Kecamatan Sukorejo, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Langkah perbaikan :

Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan dalam hal ini masyarakat,

mulai dari tata tempat, sarana prasarana hingga kualitas waktu pemenuhan hasil layanan dapat ditetapkan dengan meminta saran masyarakat pengguna layanan. Konsep ini lebih humanis karena setiap pemohon dapat merasakan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu melalui konsep ini juga memberikan ruang kepada pemohon untuk memberikan saran dan kritik guna perbaikan layanan, artinya saran dan kritik yang disampaikan dapat disampaikan kepada penyedia layanan dan wajib ditindaklanjuti segera guna perbaikan layanan.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah.

Langkah perbaikan :

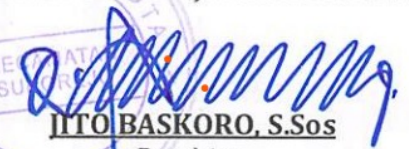
Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Melalui pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial.

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Langkah perbaikan :

Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan, yaitu dengan Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Blitarh menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

ITO BASKORO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19690601 199003 1 010

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Tahun 2022

MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

MISI 5 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2022				2020	2022				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Baik (89)	Baik (89)	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	97%	97%	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan. 2. Peningkatan pengendalian pelayanan publik. 3. Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta keprotokolan.		
					2. Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	75%	75%	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan. 2. Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan.		
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil review Irda	A	A	3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,76)	A (84,76)	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	1. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		

Blitar, 14 Februari 2023

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

ITO BASKORO, S.Sos

Pembina

NIP. 19690601 199003 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN	PERSENTASE PELAYANAN YANG SESUI STANDART PELAYANAN	97%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu	97%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1.400.804.465	
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	120 Orang	317.654.900	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
									Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	15 kelompok		
									Jumlah peserta lomba	15 tim		

								keolahragaan				
								Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 tradisi lokal			
								Persentase penerima santunan kematian	100%			
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembiayaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	50 Orang	186.766.000	Kelurahan Pakunden
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga			
								Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	3 kelompok			
								Jumlah peserta lomba keolahragaan	18 tim			
								Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 tradisi lokal			
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembiayaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	60 Orang	202.678.700	Kelurahan Blitar

								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	3 lembaga		
								Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	2 kelompok		
								Jumlah peserta lomba keolahragaan	10 tim		
								Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 tradisi lokal		
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembiayaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	30 Orang	137.579.500	Kelurahan Tlumpu
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	3 lembaga		
								Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	2 kelompok		
								Jumlah peserta lomba keolahragaan	10 tim		
								Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 tradisi lokal		
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah peserta pembiayaan perekonomian dan	100 Orang	159.077.000	Kelurahan Turi

								Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kesejahteraan rakyat			
									Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	6 lembaga		
									Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	1 kelompok		
									Jumlah peserta lomba keolahragaan	2 tim		
									Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 tradisi lokal		
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	80 Orang	147.027.800	Kelurahan Karangsari
									Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	10 lembaga		
									Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	2 kelompok		
									Jumlah peserta lomba keolahragaan	14 tim		
									Jumlah tradisi lokal yang	2 tradisi lokal		

									diselenggarakan			
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	75 Orang	116.786.665	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah lembaga/organisa si kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
									Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	2 kelompok		
									Jumlah peserta lomba keolahragaan	2 tim		
									Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 tradisi lokal		
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat	30 Orang	133.233.900	Kelurahan Tanjungsari
									Jumlah lembaga/organisa si kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
									Jumlah kelompok yang mengikuti	3 kelompok		

									pameran			
									Jumlah peserta lomba keolahragaan	3 tim		
									Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 tradisi lokal		
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			806.566.775	
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	401.199.925	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah P3N/modin nikah yang terfasilitasi	11 orang		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta pemahaman zona integritas dan pelayanan online	50 orang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	60 orang		

								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	79.809.600	Kelurahan Pakunden
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	85 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	20.633.700	Kelurahan Blitar
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	23 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	23.874.400	Kelurahan Tlumpu

								Masyarakat di Kecamatan				
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	23 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	50.893.200	Kelurahan Turi
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	50 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	42.684.250	Kelurahan Karangsari
									Jumlah dokumen	1		

									SKm yang tersusun	dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	40 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	92.702.200	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		
									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	100 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
								Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	2 dokumen	94.769.500	Kelurahan Tanjungsari
									Jumlah dokumen SKm yang tersusun	1 dokumen		

									Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	16 pelayanan		
									Jumlah lomba pelayanan	1 lomba		
									Jumlah peserta nikah gratis yang difasilitasi	65 pasang		
									Jumlah peserta pembinaan pelayanan	0 orang		
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN WILAYAH	PERSENTASE RT BERDAYA	75%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.464.038.793	
				Persentase RT Berdaya	75%			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	115 orang	730.680.900	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah lokasi pembangunan/peeliharaan sarana dan prasarana umum	7 lokasi		
									Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	186 RT		
									Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	7 dokumen		
									Jumlah lokasi kerja bhakti	4 lokasi		

12.788

								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	60 kelompok		
								Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	2 lomba		
								Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	200 orang	2.119.896.300	Kelurahan Pakunden
								Jumlah lokasi pembangunan/pe meliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
								Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
								Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
								Jumlah lokasi kerja bhakti	3 lokasi		
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga		

								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
								Jumlah lomba pmasbang yang difasilitasi	1 lomba		
								Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPd	60 orang	1.026.404.700	Kelurahan Blitar
								Jumlah lokasi pembangunan/pe meliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
								Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
								Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
								Jumlah lokasi kerja bhakti	2 lokasi		
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga		
								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
								Jumlah dokumen profil yang	2 dokumen		

									tersusun			
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	100 orang	1.012.586.900	Kelurahan Tlumpu
									Jumlah lokasi pembangunan/pe meliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
									Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
									Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
									Jumlah lokasi kerja bhakti	4 lokasi		
									Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 lembaga		
									Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
									Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
									Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	1 lomba		
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	80 orang	810.283.600	Kelurahan Turi
									Jumlah lokasi pembangunan/pe meliharaan	1 lokasi		

									sarana dan prasarana umum			
									Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
									Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
									Jumlah lokasi kerja bhakti	3 lokasi		
									Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
									Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
									Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
									Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	1 lomba		
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang RKPD	765 orang	1.114.982.100	Kelurahan Karangsari
									Jumlah lokasi pembangunan/peeliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
									Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		

								Jumlah dokumen Laporan monitoring dan evaluasi RT berdaya	1 dokumen		
								Jumlah lokasi kerja bhakti	8 lokasi		
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
								Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	2 dokumen		
								Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 lomba		
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	2130 orang	3.161.072.302	Kelurahan Sukorejo
								Jumlah lokasi pembangunan/peeliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
								Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
								Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
								Jumlah lokasi kerja bhakti	4 lokasi		

								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
								Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
								Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	1 lomba		
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta musrenbang RKPD	1170 orang	2.488.131.991	Kelurahan Tanjungsari
								Jumlah lokasi pembangunan/peeliharaan sarana dan prasarana umum	1 lokasi		
								Jumlah RT yang penyerapan anggarannya 75%	0 RT		
								Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi RT Berdaya	1 dokumen		
								Jumlah lokasi kerja bhakti	9 lokasi		
								Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		

								Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	4 kelompok		
								Jumlah dokumen profil yang tersusun	2 dokumen		
								Jumlah lomba pemasbang yang difasilitasi	1 lomba		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah ditindaklanjuti	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		324.935.500	
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah alat bahan pendukung PPKM yang tersedia	7 macam	47.279.100
									Jumlah dokumen monev PPKM	2 dokumen	
									Jumlah orang yang difasilitasi Posko PPKM	10 orang	
									Jumlah Patroli PPKM	70 kali	
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah orang yang difasilitasi posko	4 orang	44.040.000
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah orang yang difasilitasi posko	2 orang	30.828.000
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah orang yang difasilitasi posko	4 orang	44.040.000

								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah alat bahan pendukung PPKM yang tersedia	4 orang	44.040.000	Kelurahan Turi
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah alat bahan pendukung PPKM yang tersedia	5 macam	33.996.400	Kelurahan Karangsari
									Jumlah aplikasi yang dipakai	1 paket		
									Jumlah orang yang difasilitasi posko PPKM	2 orang		
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah fotokopi untuk pendukung kegiatan	1130 lembar	36.672.000	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah orang yang difasilitasi posko PPKM	3 orang		
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah orang yang difasilitasi posko PPKM	4 orang	44.040.000	Kelurahan Tanjungsari
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI	100%	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan bidang umum pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia			556.992.010	

556.9

								Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	273.114.700	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		
									Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	40 orang		
									Jumlah peserta lelang bengkok	7 kelurahan		
									Jumlah wajib pajak membayar PBB	17.234 WP		
									Jumlah Patroli keamanan wilayah	96 patroli		
									Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	2 lomba		

									Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	3 lembaga		
								Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	31.745.500	Kelurahan Pakunden
									Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		
									Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	30 orang		
									Jumlah wajib pajak membayar PBB	3.361 WP		
									Jumlah Patroli keamanan wilayah	48 patroli		

									Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba		
									Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga		
								Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	61.159.100	Kelurahan Blitar
									Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		
									Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	40 orang		
									Jumlah wajib pajak membayar PBB	1.800 WP		
									Jumlah Patroli keamanan	36 patroli		

								wilayah				
								Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba			
								Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga			
							Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	25.899.900	Kelurahan Tlumpu	
								Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS			
								Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS			
								Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang			
								Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	75 orang			
								Jumlah wajib pajak membayar PBB	1.789 WP			

								Jumlah Patroli keamanan wilayah	12 patroli		
								Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba		
								Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga		
							Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	16.998.600	Kelurahan Turi
								Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
								Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
								Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		
								Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	30 orang		
								Jumlah wajib pajak membayar	1.045 WP		

								PBB				
								Jumlah Patroli keamanan wilayah	24 patroli			
								Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba			
								Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga			
							Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	45.594.700	Kelurahan Karang Sari	
								Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS			
								Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS			
								Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang			
								Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	50 orang			

								Jumlah wajib pajak membayar PBB	1.695 WP		
								Jumlah Patroli keamanan wilayah	16 patroli		
								Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba		
								Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga		
							Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	73.173.510	Kelurahan Sukorejo
								Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
								Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
								Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		
								Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan	20 orang		

									ketertiban umum			
									Jumlah wajib pajak membayar PBB	3.749 WP		
									Jumlah Patroli keamanan wilayah	62 patroli		
									Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba		
									Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga		
								Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang difasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0 orang	29.306.000	Kelurahan Tanjungsari
									Jumlah TPS yang difasilitasi	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba TPS	0 TPS		
									Jumlah Peserta Lomba Sosialisasi Pemilu	0 orang		

									Jumlah Peserta pembinaan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum	20 orang		
									Jumlah wajib pajak membayar PBB	3.450 WP		
									Jumlah Patroli keamanan wilayah	50 patroli		
									Jumlah lomba trantibum yang difasilitasi	1 lomba		
									Jumlah lembaga /organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga		
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	BAIK (89)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	BAIK (89)	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standart	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah			33.710.100	12.548
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	21.973.100	Kecamatan Sukorejo
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	841.800	Kelurahan Pakunden
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	4.232.400	Kelurahan Blitar

								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	644.900	Kelurahan Tlumpu
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	1.742.900	Kelurahan Turi
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	2.532.000	Kelurahan Karangsari
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	1.743.000	Kelurahan Sukorejo
								Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen		Kelurahan Tanjungsari
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			32.218.600	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	18.212.200	Kecamatan Sukorejo
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	714.800	Kelurahan Pakunden

								SKPD				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	2.571.900	Kelurahan Blitar
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	512.000	Kelurahan Tlumpu
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	1.913.600	Kelurahan Turi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	2.631.800	Kelurahan Karang Sari
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	2.630.000	Kelurahan Sukorejo
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	3.032.300	Kelurahan Tanjungsari

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.647.963.454	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	1 PD	8.647.963.454	Kecamatan Sukorejo
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	18.415.600	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	5.762.700	Kecamatan Sukorejo
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (bulanan/semesteran)	4 dokumen	819.900	Kelurahan Pakunden
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	1.797.800	Kelurahan Blitar
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (bulanan/semesteran)	4 dokumen	771.600	Kelurahan Tlumpu

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	1.962.000	Kelurahan Turi
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (bulanan/semesteran)	4 dokumen	2.821.000	Kelurahan Karangsari
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	2.642.400	Kelurahan Sukorejo
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (bulanan/semesteran)	4 dokumen	1.838.200	Kelurahan Tanjungsari
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			562.282.202	
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian Jumlah publikasi	5 event 155 orang 2 publikasi	399.999.970	Kecamatan Sukorejo

									program/kegiatan perangkat daerah			
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	18.491.500	Kelurahan Pakunden
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	30.526.500	Kelurahan Blitar
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	20.240.300	Kelurahan Tlumpu
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	25.073.720	Kelurahan Turi
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	23.894.600	Kelurahan Karangsari
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	19.071.920	Kelurahan Sukorejo
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang di ikuti	5 event	24.983.692	Kelurahan Tanjungsari
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		38.074.600	

							daerah sesuai standar		yang tersedia			
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 komponen	5.243.800	Kecamatan Sukorejo
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 komponen	6.244.800	Kelurahan Pakunden
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 komponen	5.737.900	Kelurahan Blitar
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 komponen	2.156.700	Kelurahan Tlumpu
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 komponen	3.573.600	Kelurahan Turi
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 komponen	5.311.000	Kelurahan Karangsari

								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 komponen	2.039.800	Kelurahan Sukorejo
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 komponen	7.767.000	Kelurahan Tanjungsari
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		252.870.050	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	6 macam	143.809.250	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	2 macam		
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	11.000.000	Kelurahan Pakunden
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 macam		
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	53.305.700	Kelurahan Tlumpu
									Jumlah perlengkapan gedung kantor	0 macam		

									yang tersedia				
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	2 macam	13.384.900	Kelurahan Turi	
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 macam			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	3 macam	22.482.200	Kelurahan Karang Sari	
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 buah			
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	8.888.000	Kelurahan Sukorejo	
									Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	0 macam			
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		113.566.650		
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	32 macam	80.236.850	Kecamatan Sukorejo	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	8.772.000	Kelurahan Pakunden	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor	10 macam	5.737.900	Kelurahan Blitar	

									yang tersedia				
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	2.023.200		Kelurahan Tlumpu
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	4.252.000		Kelurahan Turi
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	7.220.100		Kelurahan Karangsari
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	4 macam	655.500		Kelurahan Sukorejo
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	10 macam	4.669.100		Kelurahan Tanjungsari
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		310.677.650		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	2500 dos	120.104.700		Kecamatan Sukorejo
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	37 macam			
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	551 dos	22.698.100		Kelurahan Pakunden

									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	24 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	48 dos	12.740.700	Kelurahan Blitar
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	11 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	272 dos	39.956.200	Kelurahan Tlumpu
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	11 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	660 dos	22.800.050	Kelurahan Turi
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	15 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	800 dos	58.612.700	Kelurahan Karangsari
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	288 dos	22.689.400	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	15 macam		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	120 dos	11.075.800	Kelurahan Tanjungsari

									tersedia			
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	5 macam		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan		70.289.300	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 cetakan	20.021.000	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah lembar penggandaan	6000 lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan	3.513.000	Kelurahan Pakunden
									Jumlah lembar penggandaan	2188 lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan	8.560.800	Kelurahan Blitar
									Jumlah lembar penggandaan	3456 lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan	5.355.300	Kelurahan Tlumpu
									Jumlah lembar penggandaan	1207 lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3 cetakan	4.544.100	Kelurahan Turi
									Jumlah lembar penggandaan	3510 lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3 cetakan	10.181.700	Kelurahan Karangsari
									Jumlah lembar penggandaan	15504 lembar		

								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 Cetakan	5.819.800	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah lembar penggandaan	14560 Lembar		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan	5 cetakan	12.293.600	Kelurahan Tanjungsari
									Jumlah barang cetakan yang tersedia	10122 lembar		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah lembar penggandaan		46.766.000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	6.266.000	Kecamatan Sukorejo
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4.800.000	Kelurahan Pakunden
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	6.300.000	Kelurahan Blitar
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4.440.000	Kelurahan Tlumpu
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 bahan bacaan	8.640.000	Kelurahan Turi

								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	5.280.000	Kelurahan Karangsari
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 bahan bacaan	5.520.000	Kelurahan Sukorejo
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	5.520.000	Kelurahan Tanjungsari
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		83.996.000	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	54 rapat	74.998.450	Kecamatan Sukorejo
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		249.614.533	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	5 rekening	51.442.800	Kecamatan Sukorejo
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	26.827.856	Kelurahan Pakunden

								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	27.946.120	Kelurahan Blitar
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	30.775.200	Kelurahan Tlumpu
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	46.452.900	Kelurahan Turi
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	2 rekening	12.073.680	Kelurahan Karangsari
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	2 Rekening	18.944.797	Kelurahan Sukorejo
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	35.151.180	Kelurahan Tanjungsari
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			957.600.000	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan kebersihan	9 orang	957.600.000	Kecamatan Sukorejo
									jumlah tenaga penunjang perkantoran sedia (jasa resepsionis)	9 orang		
									jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia (tenaga keamanan)	12 orang		

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		151.342.900	
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya			
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 unit	87.599.200	Kecamatan Sukorejo
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	10 unit		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	6.512.800	Kelurahan Pakunden
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	6 unit		

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	9.428.700	Kelurahan Blitar
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	7 unit		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit	10.639.100	Kelurahan Tlumpu
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	5 unit		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	8.851.900	Kelurahan Turi
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	7 unit		

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	9.897.100	Kelurahan Karangsari
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	6 unit		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	11.320.700	Kelurahan Sukorejo
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	7.093.400	Kelurahan Tanjungsari
									Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	6 unit		

								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		51.092.700	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	8 jenis	16.222.300	Kecamatan Sukorejo
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	3.803.000	Kelurahan Pakunden
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 macam	3.614.800	Kelurahan Blitar
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	5.755.000	Kelurahan Tlumpu
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	6.329.400	Kelurahan Karangsari
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 Macam	12.328.600	Kelurahan Sukorejo
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	3.039.600	Kelurahan Tanjungsari
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		734.212.773	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	734.212.773	Kecamatan Sukorejo
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung				Kelurahan Pakunden

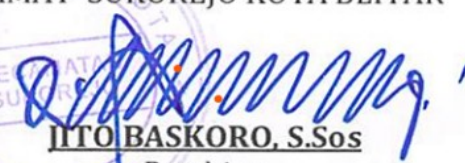
								Kantor dan Bangunan Lainnya				
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Blitar
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Tlumpu
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Turi
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Karangsari
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Sukorejo
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kelurahan Tanjungsari
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		194.091.800	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	10.978.800	Kecamatan Sukorejo

								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	13.400.000	Kelurahan Pakunden
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	18.769.600	Kelurahan Blitar
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	27.708.400	Kelurahan Tumpu
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	60.870.000	Kelurahan Turi
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 unit	4.407.400	Kelurahan Karangsari

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	26.800.000	Kelurahan Sukorejo
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	31.157.600	Kelurahan Tanjungsari

Blitar, 14 Februari 2023


 CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR

ITO BASKORO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19690601 199003 1 010

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JITO S.Sos
Jabatan : CAMAT SUKOREJO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
CAMAT SUKOREJO,

JITO S.Sos
Pembina
NIP. 19690601 199003 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis/Progam/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	97%
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	75%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai standart	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase RT berdaya	75%
	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100%
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.184.578.390,00	PAD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.365.305.065,00	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	819.273.325,00	PAD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.147.167.185,00	DAU dan/atau DID
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.852.766.085,00	DAU, DID
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	294.401.100,00	DAU
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	527.059.710,00	PAD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	527.059.710,00	PAD
JUMLAH		15.858.805.285,00	P-APBD

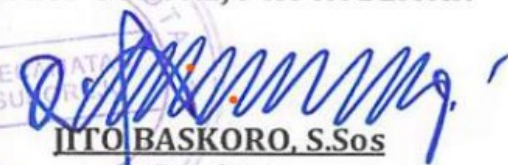


**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	(Jumlah Pelayanan yang sesuai standart : Jumlah Pelayanan) x 100%	97%	96%	98,81%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp2.184.578.390,00	Rp2.093.743.638,00	95,84%	
2	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	(Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kelurahan Berdaya/Jumlah Kelurahan) x 100%	75%	100%	133,33%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp13.147.167.185,00	Rp13.129.667.749,00	99,87%	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp527.059.710,00	Rp511.527.300,00	97,05%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sukorejo) pada tahun berjalan	A (84,76)	A(85,00)	100,28%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp12.712.720.048,00	Rp12.531.404.992,03	98,57%	

Blitar, 14 Februari 2023

CAMAT SUKOREJO KOTA BLITAR



ITO BASKORO, S.Sos

Pembina

NIP. 19690601 199003 1 010

